

PELAKSANAAN PROGRAM PENANGANAN GANGGUAN PSIKOTIK DI RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN KOTA PEKANBARU

RAMADINUR

Prof.Dr.H.Sujianto,M.Si

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293, Telp/fax (0761)
63277

e-mail: ramadinur@rocketmail.com

***Abstrack** : Overcome people with psychotic disorders be essential especially in the critical condition economy, and the conditions are increasingly erratic. Management development social welfare is a duty, authorities and responsibilities of local government as the implementation with regional autonomy. But not least, were also participation people through social organization, and other organization to participate in overcome social welfare. The be a goal for this research is to know the program on distrubance psychotics in a tampan mental hospital pekanbaru. Concept theory that researchers used was implement and programs. This research using methods reserch qualitative studies with file in descriptive. In the collection of data, researchers used technique interview observation and documentation. By using key informan as a source of information and engineering triangulation as a source of in testing the validity of file. This researh result indicates that the implementation of the program of psychotic disorders in a tampan mental hospital pekanbaru not run optimally. The affect the program handling psychotic disorders in a tampan mental hospital handsome pekanbaru is still lack of resouces implemantion, and lack of supporting facilities program execution, communication.*

Keywords: Implemantion, program, psychotic disorders

Abstrak Mengatasi penyandang gangguan psikotik menjadi penting terutama di saat kondisi kritis ekonomi, dan kondisi yang semakin tidak menentu. Pengelolaan pembangunan kesejahteraan sosial memang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah. Akan tetapi tidak kalah penting juga ikut sertaan masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya, dan organisasi lainnya untuk ikut berpartisipasi dalam mengatasi kesejahteraan sosial. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui Pelaksanaan Program pada gangguan psikotik di Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru. Konsep teori yang peneliti gunakan adalah Pelaksanaan dan Program. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengkajian data secara deskriptif. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan menggunakan *key informan* sebagai sumber informasi dan teknik triangulasi sebagai sumber dalam pengujian keabsahan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Program penanganan Gangguan Psikotik di Rumah Sakit Jiwa tampan Pekanbaru belum berjalan secara optimal. Adapun yang mempengaruhi Pelaksanaan Program penangana gangguan psikotik di rumah sakit jiwa tampan Pekanbaru adalah masih kurangnya sumber daya pelaksana serta kurangnya fasilitas pendukung pelaksanaan program, komunikasi.

Kata Kunci : *Pelaksanaan, Program, Gangguan Psikotik.*

Salah satu pusat kesehatan yang terkenal di kota Pekanbaru ini adalah pusat kesehatan Rumah Sakit Jiwa Tampan yang dikelola oleh provinsi Riau, rumah sakit ini terletak di Jalan H.R Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru. Sebagai mana dalam kota besar lainnya yang banyak terdapat permasalahan-permasalahan yang kompleks, tak lain halnya dengan yang terjadi di kota Pekanbaru misalnya permasalahan yang terjadi didalam bidang sosial seperti gelandangan, pengemis dan orang gila/ gelandangan psikotik yang berkeliaran di sudut-sudut kota Pekanbaru.

Menurut **Lylayuveri (2008)**, psikosis adalah suatu keadaan kejiwaan yang ditandai dengan adanya gangguan atau hilangnya realitas pada seseorang. Gejala psikosis adalah waham, halusinasi, disorganisasi pikiran-pembicaraan dan gangguan isi pikir.

Penanganan masalah sosial gelandangan psikotik di wilayah perbatasan dan perkotaan ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh upaya pengelolaan terhadap penderita tuna laras psikotis agar tidak menjadi gelandangan yang dilaksanakan dinas teknis maupun masyarakat itu sendiri. Gelandangan Psikotik adalah orang yang mengalami gangguan kejiwaan yang berkeliaran di jalanan.

Pentingnya Penanganan Psikotis adalah :

Untuk mendapatkan perawatan yang intensif untuk para gangguan psikotik agar tidak berkeliaran di jalanan. bagi sebagian besar masyarakat kota Pekanbaru penderita psikotik yang berkeliaran di jalanan tersebut dapat mengganggu pemandangan di kota Pekanbaru. Selain itu dapat menyebabkan terjadinya fikiran negatif bagi para masyarakat di luar Pekanbaru yang berkunjung ke Pekanbaru, hal ini dapat memperburuk imeks kota Pekanbaru sebagai pusat kota yang memiliki Rumah Sakit Jiwa di Provinsi Riau.

Tugas Pokok Rumah Sakit Jiwa Tampan

Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau mempunyai tugas :

Melaksanakan Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan rumah sakit khusus jiwa dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam Rangka dekonsentrasi.

Para ahli menjelaskan arti kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Definisi ini dibuatnya dengan menghubungkan pada definisi lain. Banyak pakar menyebutkan kebijakan pemerintahan sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintahan yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Ini sesuai dengan pemikiran Carl Friedman yang mengatakan bahwa hal yang paling pokok bagi

suatu kebijakan adalah tujuan (*goal*), sasaran (*objective*) atau kehendak (*purpose*) (Abidin, 2002).

Kebijakan adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintahan. Kebijakan tersebut telah membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik. Policy dalam arti yang bertugas mengendalikan negara dan strategi kekuasaan adalah hasil dari *outcome* dari proses sistem politik yang dapat dinamakan output. Sistem politik dalam bentuk *action*, dan juga bisa desisi atau kebijakan. Dari konsep diatas, bahwa kebijakan umum merupakan bagian dari keputusan politik.

Carl Friedrich dalam Winarno (2002) Mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, guna mengatasi hambatan-hambatan serta memanfaatkan kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud. Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Wahab, 2004) menjelaskan bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman kebijakan yang mencakup, baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

1. Penyesuaian diri

Pengukurannya :

- SDM yang berkualitas
- Lingkungan yang mendukung untuk pelaksanaan program
- Keuangan yang berjalan lancar

2. Pengoperasian

Pengukurannya :

- Yang menjalankannya harus orang yang ahli di bidangnya
- SDM yang berkualitas

3. Waktu

Pengukurannya :

- Ketepatan waktu adalah sangat penting karena kebanyakan orang melalaikan waktu

4. Hasil

Pengukurannya :

- Hasil yang baik apabila dilaksanakan dengan sesuai prosedur yang ada

Adapun Program Penanganan Gangguan Psikotik di Rumah Sakit Jiwa Tampan adalah :

- Home Visit Pasien
- Pengadaan paket pakaian pasien dan gendangan psikotik
- Penjaringan pasien gendangan psikotik
- Terapi aktifitas kelompok gangguan psikotik
- Terapi regional pasien gangguan psikotik
- Pemulangan Pasien yang tidak mampu

Implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut kebijakan ke tataran praktis dan operasional. Menurut **Edward (2003:32)** ia mengembangkan model didahului dengan dua permasalahan yang menjadi pertanyaan yaitu :

1. Kondisi – kondisi awal apakah yang diperlukan untuk menyukseskan implementasi kebijakan. 2. Hambatan apakah yang ada didalam mengimplementasikan kebijakan. Untuk

menjawab dua pertanyaan itu Edward mengidentifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain. Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang penting , karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu akan selalu berurusan dengan permasalahan bagaimana hubungan dilakukan.

2. Sumber Daya

Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas konsistensinya ketentuan – ketentuan atau aturan – aturan kebijakan, jika para personil bertanggung jawab mengimplementasikan suatu kebijakan kurang mempunyai sumber – sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bias efektif.

Disamping itu, harus ada ketetapan atau kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan. Dana untuk membiayai operasional implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kerelaan dan kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut.

3. Disposisi (Sikap)

Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut

4. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber – sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi bisa jadi masih belum efektif karena keefisienan struktur birokrasi yang ada.

METODE

Penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative research*). Jenis penelitian ini mempunyai ciri-ciri antara lain setting yang aktual, peneliti adalah instrumen kunci, data bersifat deskriptif, menekankan kepada proses, analisis datanya bersifat induktif, dan *meaning* (pemaknaan) tiap *even* merupakan perhatian yang esensial dalam penelitian kualitatif. Dasar pertimbangan memilih penelitian kualitatif adalah: (1) data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat; (2) dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat; (3) dapat membimbing untuk memperoleh penemuan yang tidak diduga sebelumnya dan, (4) dapat melangkah lebih jauh dari praduga dan kerangka kerja awal.

Pemilihan desain kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata atau

gambar daripada data dalam wujud angka-angka. Pendekatan yang kualitatif berakar dari data, dan teori berkaitan dengan pendekatan tersebut diartikan sebagai aturan dan kaidah untuk menjelaskan proposisi yang dapat diformulasikan secara deskriptif ataupun proporsional.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah peristiwa-peristiwa atau fenomena yang terjadi di lapangan termasuk perilaku dan sikap subyek/aktor yang diteliti. Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka peneliti mengumpulkan data atau informasi dari informan kunci (*key informan*) sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Dari informan kunci inilah kemudian dilanjutkan mencari dan mengumpulkan data atau informasi dari para informan berikutnya dengan menggunakan teknik "*snowball sampling*" atau bola salju yang menggelinding semakin lama semakin besar.

HASIL

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada masalah penelitian dalam latar belakang bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Program Penanganan Gangguan Psikotik di Rumah Sakit Jiwa Tampan Kota Pekanbaru Masih belum Berjalannya karena masih kurangnya SDM Perawat di rumah sakit jiwa tampan dan masih adanya program yang belum berjalan seperti program penjarangan gelandangan psikotik yang ada di tepi-tepi jalan dan pingiran kota adapun sarana dan prasarana yang belum memadai untuk perawatan pasien psikotik itu sendiri.

PEMBAHASAN

Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Penanganan Gangguan Psikotik di Rumah Sakit Jiwa Tampan Kota Pekanbaru, perlu ditelaah dan dielaborasi informasi maupun data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan, wawancara dengan narasumber, dan telaah dokumentasi di lokasi penelitian.

1. Penyesuaian Diri

Penyesuaian Diri yaitu Penyesuaian diri terhadap lingkungan atau terhadap programnya meliputi indikatornya:

a. Keterbatasan Jumlah SDM keperawatan

Suatu kebijakan termasuk diantaranya adalah sebuah Program yang dibentuk, dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai sumber-sumber tertentu dan sumber tersebut akan membawa pengaruh terhadap pelaksanaannya. Sumber daya mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil bertanggung jawab melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

b. Lingkungan / sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan untuk menunjang Pelaksanaan Program Penanganan Gangguan Psikotik di Rumah Sakit Jiwa Tampan ini, dimana tanpa sarana dan prasarana yang memadai tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal dan tentunya juga tidak akan menghasilkan hasil yang optimal. Oleh sebab itu dalam hal ini dibutuhkan sarana dan prasarana yang cukup untuk mempermudah operasional Program Penanganan Gangguan Psikotik di Rumah Sakit Jiwa Tampan.

Jadi dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa dari lingkungan atau sarana prasarana untuk pelaksanaan program penanganan psikotik tidak berjalan dengan baik, karena jumlah pasien yang ada dalam satu ruangan sangat tidak sesuai dengan kapasitas yang ada. Seharusnya sudah mulai adanya penambahan Ruang rawat pasien atau perluasan Rumah Sakit Jiwa Tampan dalam pembangunan sarana dan prasarana nya.

c. Keuangan

Dari segi keuangan dari Rumah Sakit Jiwa Tampan masih memerlukan dana dari APBD Provinsi Riau untuk menjalankan kegiatan di Rumah Sakit Jiwa Tampan, karena Rumah Sakit Jiwa Tampan belum bisa berdiri sendiri.

Dari Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Penyesuaian diri (adjustment) dalam pelaksanaan program penanganan gangguan psikotik di rumah sakit jiwa tampan masih belum sempurna dalam pelaksanaannya dan masih banyak hambatan-hambatan seperti SDM yang kurang dan dari segi lingkungan atau sarana dan prasarana yang kurang. Dan dalam keuangan juga masih belum bisa berdiri sendiri masih mengangarkan dana APBN pusat.

2. Pengoperasian

Pengoperasian yaitu bagaimana cara-cara melaksanakan program dari sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk itu dikembangkan instrument yang meliputi indikatornya:

a. SDM yang ahli di bidangnya / SDM yang berkualitas

SDM ini sangat di perlukan sekali seperti yang sudah di terangkan bahwa SDM memang harus sejalan dengan pelaksanaan dan pengoperasian program penanganan Psikotik di Rumah sakit jiwa tampan.

Dari hasil wawancara tersebut Pengoperasian dan pelaksanaan berjalan lancar dengan hambatan-hambatan yang ada seperti SDM di rumah sakit Jiwa Tampan yang kekurangan menjadi faktornya dalam hal ini SDM perawat.

3. Waktu yang Tepat dalam Pelaksanaan Program Penanganan Gangguan Psikotik di Rumah Sakit Jiwa Tampan

Waktu yang tepat yaitu ketepatan waktu untuk pelaksanaan program tersebut agar mendapatkan hasil yang diinginkan di rumah sakit jiwa tampan.

a. harus tepat waktu agar hasilnya bagus juga.

Waktu perencanaan Program adalah akhir tahun dan pelaksanaannya awal tahun dan maka pelaksanaan yang dilakukan Rumah Sakit Jiwa Tampan adalah awal tahun hingga akhir tahun.

Jadi, Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan Waktu pelaksanaan program penanganan psikotik di rumah sakit jiwa tampan berjalan dengan baik, karena pelaksanaan program itu harus dilaksanakan setiap waktunya. Jadi setiap saat merupakan waktu pelaksanaan program penanganan psikotik yang disesuaikan dengan yang dibutuhkan pada saat tersebut.

4. Hasil

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan semua program penanganan psikotik di Rumah Sakit Jiwa Tampan adalah berjalannya program dengan baik dan bisa melayani masyarakat dengan semestinya dan bisa menjalankan tugas dari Rumah Sakit Jiwa Tampan itu sendirinya.

Jadi, dari hasil wawancara tersebut kita bisa melihat kalau hasil kinerja pelaksanaan program penanganan gangguan psikotik di rumah sakit jiwa tampan berjalan dengan baik, dan agar di tingkatkan mutu dan kualitas pelayanan dan pelaksanaan programnya di tingkatkan agar menjadi rumah sakit jiwa panutan atau contoh dari rumah sakit jiwa yang ada di Indonesia.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Penanganan Gangguan Psikotik di Rumah Sakit Jiwa Tampan Kota Pekanbaru, penulis menggunakan teori oleh Edward III. Edward III mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Pelaksanaan kebijakan, meliputi indikator-indikator sebagai berikut:

1. Komunikasi

Menurut Rosady Ruslan (2005 : 79) proses komunikasi dapat diartikan sebagai "transfer informasi" atau pesan-pesan (*messages*) dari pengirim pesan (komunikator) kepada penerima (komunikan), dengan catatan bahwa proses tersebut bertujuan tercapainya saling pengertian (*mutual understanding*) di antara kedua belah pihak. Sebelum pesan-pesan itu dikirim kepada komunikan, komunikator memberikan makna-makna dalam pesan tersebut (*decode*) yang kemudian ditangkap oleh komunikan dan diberikan makna sesuai dengan konsep yang dimilikinya (*encode*).

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa komunikasi merupakan faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Penanganan Gangguan Psikotik di Rumah Sakit Jiwa Tampan Kota Pekanbaru. Kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh pihak pelaksana atau petugas sosialisasi kepada masyarakat selaku pemanfaat untuk Program tersebut, masyarakat kurang paham dan tidak mengerti dengan arahan-arahan atau penyuluhan yang dilakukan petugas Pelaksana Program Penanganan Gangguan Psikotik di Rumah Sakit Jiwa Tampan Kota Pekanbaru.

2. Sumber daya

Sumber daya yang dimaksudkan adalah jumlah staff pelaksana yang mempunyai kemampuan dan ketrampilan yang memadai artinya sesuai dengan yang dibutuhkan, adanya

fasilitas yang mendukung kelancaran pelaksanaan proyek, dan pelimpahan wewenang dari atasan kepada pelaksana di lapangan.

Walaupun tujuan atau isi dari kebijakan itu sudah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya tersebut dapat terwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementator, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

Dari Hasil Wawancara dan hasil analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Program dalam SDM perawat yang masih terbatas dan masih kurang dari yang diharapkan yang seharusnya 3 orang pasien dirawat oleh 1 orang perawat tetapi di lapangan atau faktanya 11 orang pasien jiwa dirawat oleh 1 orang perawat jadi tidak sesuai jumlah perawat saat ini yang masih kurang. Sarannya agar ditambahkan jumlah perawat saat ini dan disesuaikan dengan jumlah pasien saat ini dan sesuai dengan yang dibutuhkan dan sesuai dengan peraturan dalam perawatan pasien di rumah sakit Jiwa Tampan Kota Pekanbaru.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga tidak akan efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Sub indikatornya adalah :

- a. Adanya prosedur pengoperasian standar (SOP) yang dapat membantu organisasi/lembaga dalam mengimplementasikan kebijakan.
- b. Adanya pembagian tanggung jawab untuk sebuah bidang kebijakan di antara unit-unit organisasional.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas pelaksana program Penanganan Gangguan Psikotik di Rumah Sakit Jiwa Tampan Kota Pekanbaru mengenai standar prosedur operasional program, penulis menarik kesimpulan bahwa SOP diberlakukan tetap terhambat pada fasilitas yang ada pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Kota Pekanbaru, sehingga masyarakat lebih memilih melakukan KB di Rumah Sakit atau tempat yang memiliki fasilitas lebih lengkap,

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan oleh peneliti dari uraian pada bab sebelumnya mengenai Pelaksanaan Program Penanganan Gangguan Psikotik di Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru, maka diperoleh kesimpulan

bahwa Program Penanganan Gangguan Psikotik di Rumah Sakit Jiwa Tampan Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal, hal ini disebabkan antara lain :

1. Belum berjalannya Penjaringan Gangguan Psikotik dilihat dari masih banyaknya pasien gangguan psikotik yang masih berkeliaran .
2. Sumber daya pendukung seperti sarana dan prasarana untuk Pelaksanaan Program Penanganan gangguan psikotik di Rumah Sakit Jiwa Tampan belum memadai.
3. SDM dan pasien

Jadi dapat di simpulkan bahwa Rumah Sakit Jiwa Tampan kurang jumlah perawat atau SDM Perawat yang seharusnya 3 orang pasien di rawat oleh 1 orang perawat ahli, tetapi di lapangan atau di Rumah Sakit Jiwa Tampan tidak sesuai atau tidak terlaksana nya hal tersebut karena ditemukan dilapangan bahwa 13 orang pasien di rawat oleh 1 orang perawat.

DAFTAR PUSTAKA

- AG. Subarson, 2005. *Analisis Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar*. Yogyakarta.
- Budi Winarmo. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Media Pressindo. Yogyakarta.
- Dye, R. Thomas, 1978, *Understanding Publik Policy, Prentice – Hall, Inc*, Englewood Cliffs, New Jersey
- Edi Suharto. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Hanip Nurcholis. 2005. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Hooegerwef, A. 1983. *Ilmu Pemerintahan*. Erlangga. Jakarta.
- Malayu S.P Hasibuan. 2003. *Managemen dlam Pengertian dan Masalah*. Bumi Aksara. Jakarta .
- Miftah Thoha. 1984. *Dimensi-Dimensi Ilmu Administrasi Negara*. Rajawali. Jakarta.
- Nugroho, D.Riant . 2004. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. PT. Efek Media Komputindo. Jakarta
- Parson, Wayne. 2006. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*. Kencana Prenada Group. Yogyakarta.
- Singarimbun. 1989. *Metode Penelitian Survei*, PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*, CV. Alfa Beta, Bandung,.
- Sujianto. 2008. *Iplementasi Kebijakan Publik “ Konsep Teori dan Praktek”*. Alaf Riau. Pekanbaru.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Balairung dan Co Yogyakarta.

Lampiran :

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial dan larangan mengelandang.

Depsos, buku tentang ketertiban sosial.